

Jurnal Audit dan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura
Vol.5, No. 2, Desember 2016 Hal 111-134

PENGARUH PDRB TERHADAP PENGANGGURAN DI KABUPATEN/KOTA KALIMANTAN BARAT

Rio Laksamana

Akademi Sekretaris Manajemen Indonesia

email : laksamana_rio@ymail.com

No telp. 085387300085

ABSTRAKSI

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pengaruh PDRB terhadap tingkat pengangguran di Kalimantan Barat. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif deskriptif. Model yang digunakan dalam penelitian adalah model regresi linier sederhana. Dari hasil analisis ditemukan bahwa nilai konstanta sebesar 8.020562. Nilai koefisien *Adjusted R-Square* (R^2) sebesar 0.632881 atau 63,28% yang menunjukkan bahwa PDRB terhadap pengangguran di Kalimantan Barat, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar variabel ini.

Hasil perhitungan dan analisis data, maka dapat dijelaskan PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran di Kalimantan Barat, artinya semakin berkurang PDRB, maka pengangguran semakin meningkat, hal ini disebabkan karena sumbangan PDRB tertinggi pada aspek pertanian, aspek pertanian tidak dapat menyerap banyak tenaga kerja sehingga walaupun PDRB naik, tidak diikuti oleh penurunan pengangguran.

Kata Kunci: *PDRB, Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi*

1. PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi suatu daerah merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus untuk mewujudkan keadaan yang lebih baik secara bersama dan berkesinambungan. Pembangunan ekonomi juga untuk memicu pemerataan pembangunan demi keberhasilan terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata.

Indikator yang sering digunakan untuk melihat keberhasilan suatu daerah adalah meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Oleh sebab itu pemerintah selalu menetapkan target laju pertumbuhan didalam perencanaan dan tujuan pembangunannya. Selain pertumbuhan ekonomi yang tinggi, suatu daerah dituntut dapat menyelesaikan berbagai masalah dalam proses pembangunan seperti halnya masalah tenaga kerja. Tidak jarang ditemui sebuah daerah dengan trend pertumbuhan ekonomi yang baik akan tetapi pengangguran di daerah tersebut tidak terbilang tinggi. Sama dengan halnya Provinsi Kalimantan Barat. Kalimantan Barat memiliki pertumbuhan ekonomi yang meningkat untuk setiap tahunnya, akan tetapi, untuk pengangguran Kalimantan Barat masih terbilang rendah khususnya pada daerah perkotaan.

Tingkat pengangguran yang rendah termasuk kedalam masalah ekonomi dan masalah sosial. Pengangguran merupakan masalah ekonomi karena ketika angka pengangguran rendah, sebagai dampaknya suatu negara atau daerah membuang barang dan jasa yang sebenarnya dapat diproduksi oleh tenaga kerja. Sebagaimana yang kita ketahui pertumbuhan ekonomi berkaitan erat dengan proses peningkatan produksi.

Pertumbuhan ekonomi berkaitan erat dengan proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan perekonomian masyarakat. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang amat penting dalam melakukan analisis tentang pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu negara ataupun daerah. Pertumbuhan ekonomi akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu, karena pada dasarnya aktivitas perekonomian adalah suatu proses penggunaan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan output, maka proses ini pada gilirannya akan menghasilkan suatu aliran balas jasa terhadap faktor produksi yang dimiliki oleh masyarakat (Mankiw, 2002).

Indikator pertumbuhan ekonomi tidak hanya mengukur tingkat pertumbuhan output dalam suatu perekonomian, namun sesungguhnya juga memberikan indikasi

[JAAKFE, Desember 2016]

tentang sejauh mana aktivitas dalam perekonomian yang terjadi pada suatu periode tertentu telah menghasilkan pendapatan bagi masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi dalam sistem pemerintahan daerah diindikasikan dengan meningkatnya produksi barang dan jasa yang diukur melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Untuk memberikan gambaran mengenai kondisi pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat dapat dilihat pada table 1.

Provinsi Kalimantan Barat yang terdiri dari 14 kabupaten/kota memiliki Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) yang bervariasi. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya PDRB Kalimantan Barat dari periode tahun 2009 sampai 2013 yang bergerak naik dari 28.756.875,70 juta sampai 36.075.103,44 juta dalam periode lima tahun terakhir. PDRB di 14 kabupaten/kota di Kalimantan Barat yang tertinggi pada tahun terakhir di miliki oleh Kota Pontianak dengan PDRB sebesar 7.950.259,64 juta diikuti oleh Kab. Kubu Raya sebesar 5.990.818,04 juta serta Kab. Sambas 3.481.218,92 juta. Sedangkan untuk presentase PDRB terendah yaitu Kab. Kayong Utara pada tahun 2009 sebesar 411.101,42

Tabel 1.1

Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota Kalimantan Barat Menurut Harga Konstan 2010 (Jutaan Rupiah) Tahun 2009-2013

No	Kabupaten/ Kota	2009	2010	2011	2012	2013
1	Kab. Sambas	2.771.435,43	2.934.448,50	3.101.957,38	3.284.446,31	3.481.218,92
2	Kab. Bengkayang	1.114.635,38	1.166.187,32	1.232.061,70	1.302.743,89	1.381.375,85
3	Kab. Landak	1.525.775,75	1.604.103,31	1.714.765,87	1.818.227,64	1.931.081,96
4	Kab. Pontianak	1.195.416,33	1.220.825,99	1.280.110,43	1.325.457,76	1.392.742,31
5	Kab. Sanggau	2.559.425,15	2.665.715,34	2.788.527,20	2.953.726,56	3.132.182,93
6	Kab. Ketapang	2.597.582,81	2.792.790,78	3.015.699,00	3.166.643,58	3.387.320,62
7	Kab. Sintang	1.983.081,85	2.086.074,43	2.199.676,20	2.327.767,83	2.475.238,92
8	Kab. Kapuas Hulu	1.131.859,03	1.182.105,50	1.236.013,63	1.305.361,70	1.383.779,14
9	Kab. Sekadau	633.063,94	670.124,84	708.549,04	750.686,56	801.061,42
10	Kab. Melawi	507.289,40	536.448,06	571.517,06	609.104,61	650.095,80
11	Kab. Kayong Utara	411.101,42	435.429,70	461.255,74	488.989,46	518.352,14
12	Kab. Kubu Raya	4.647.308,00	4.936.652,99	5.258.029,11	5.609.791,26	5.990.818,04
13	Kota Pontianak	6.282.408,54	6.621.193,74	7.010.567,02	7.436.240,27	7.950.259,64
14	Kota Singkawang	1.165.501,49	1.230.090,19	1.309.553,90	1.390.546,88	1.479.043,97
	KALBAR	28.756.875,70	30.328.699,14	32.138.392,11	34.013.643,75	36.075.103,44

Sumber : Badan Pusat Statistik Kalimantan Barat 2009-2013

Berdasarkan tabel 1.2 rata-rata laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Barat selama lima tahun terakhir sebesar 5,46%. Pertumbuhan ekonomi Kalimantan

Barat selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya. Selama lima tahun terakhir, Kabupaten Kubu Raya merupakan Kabupaten dengan jumlah pertumbuhan ekonomi tertinggi (6,42%) dan rata-rata pertumbuhan ekonomi terendah terdapat pada Kabupaten Pontianak (3,39%). Hal ini dikarenakan beberapa faktor, diantaranya sumber daya alam, sumber daya manusia, letak strategis suatu wilayah dan komoditi unggulan yang berbeda diantara daerah, sehingga berdampak pada perbedaan laju pertumbuhan ekonomi tiap daerah.

Rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pontianak merupakan terendah diantara Kabupaten lainnya, meskipun demikian setiap tahunnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pontianak selalu mengalami kenaikan. Pada tahun 2011-2013 Kabupaten Pontianak mulai bangkit terlihat dari pertumbuhan ekonominya yang meningkat. Rendahnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pontianak disebabkan pemekaran yang terjadi tahun 2007 juga memberikan dampak bagi daerah ini, karena beberapa daerah yang dulu menjadi pusat pengembangan komoditas unggulan telah memisahkan diri menjadi Kabupaten Kubu Raya.

Tabel 1.2

**Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten/Kota Kalimantan Barat tahun 2009-2013
(Persen)**

Kabupaten/Kota	Pertumbuhan Ekonomi					
	Tahun					
	2009	2010	2011	2012	2013	Rata-rata
Kab. Sambas	5,43	5,88	5,80	5,88	5,99	5,80
Kab. Bengkayang	4,50	4,63	5,65	5,74	6,04	5,31
Kab. Landak	4,71	5,00	6,90	6,03	6,21	5,77
Kab. Pontianak	1,32	2,13	4,86	3,54	5,08	3,39
Kab. Sanggau	4,95	4,15	4,61	5,92	6,04	5,13
Kab. Ketapang	-1,22	7,51	7,98	5,01	6,97	5,25
Kab. Sintang	5,38	5,19	5,45	5,82	6,34	5,64
Kab. Kapuas Hulu	3,70	4,44	4,56	5,61	6,01	4,86
Kab. Sekadau	5,35	5,54	5,73	5,95	6,71	5,86
Kab. Melawi	4,27	5,29	6,54	6,58	6,73	5,77
Kab. Kayong Utara	2,78	5,92	5,93	6,01	6,00	5,33

Kab.Kubu Raya	5,87	6,23	6,51	6,69	6,79	6,42
Kota Pontianak	5,35	5,39	5,88	6,07	6,91	5,92
Kota Singkawang	4,88	5,54	6,46	6,18	6,36	5,88
Kalimantan Barat	4,79	5,35	5,92	5,79	6,30	5,46

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Barat, 2009-2013

Meski memiliki trend pertumbuhan ekonomi maupun PDRB yang kian meningkat setiap tahunnya, Kalimantan Barat yang terdiri dari 14 kabupaten / kota masih memiliki masalah yaitu pengangguran yang rendah khususnya pada daerah perkotaan. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Kalimantan Barat tidak memberikan kontribusi langsung terhadap masalah penyerapan tenaga kerja itu sendiri.

Setiap negara khususnya negara berkembang mengalami masalah yang sama, yaitu kesulitan dalam pengangguran. Keadaan di negara berkembang dalam beberapa waktu ini menunjukkan bahwa pembangunan yang telah dilaksanakan tidak sanggup menyediakan kesempatan kerja kepada angkatan kerja yang tersedia. Hal itu terjadi dikarenakan laju pertumbuhan angkatan kerja lebih tinggi dari pertumbuhan kesempatan kerja yang ada.

Angkatan kerja yang tumbuh cepat tentu akan menambah beban tersendiri bagi perekonomian yakni penciptaan atau perluasan lapangan kerja. Jika lowongan kerja baru tidak mampu menampung semua angkatan kerja baru maka sebagian angkatan kerja baru itu akan memperpanjang barisan penganggur yang sudah ada.

Pertumbuhan ekonomi yang setinggi-tingginya bukan merupakan satu-satunya tujuan utama dari usaha-usaha pembangunan ekonomi, tetapi pembangunan ekonomi harus pula berupaya untuk menghapus atau mengurangi tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan dan tingkat pengangguran (Todaro, 2010).

Pertumbuhan ekonomi sekiranya dapat memperlihatkan trend yang meningkat dan mantap dari tahun ke tahun, karena pertumbuhan ekonomi yang tinggi diperlukan guna mempercepat perubahan struktur perekonomian daerah menuju perekonomian yang berimbang dan dinamis. Pertumbuhan ekonomi juga diperlukan untuk menggerakkan dan memacu pembangunan di bidang-bidang lainnya sekaligus sebagai sumber kekuatan utama pembangunan dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengatasi jumlah pengangguran yang kian meningkat. Untuk itu,

peranan pemerintah sebagai salah satu faktor pendukung dalam suatu perekonomian di harapkan mampu dalam mengatasi masalah yang ada khususnya masalah pengangguran untuk wilayah Kalimantan Barat. Sehingga penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah ada pengaruh yang signifikan dari PDRB terhadap pengangguran di Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat.

2. LANDASAN TEORI DAN KAJIAN EMPIRIS

2.1 PDRB (Pendapatan Domestik Regional Bruto)

PDRB adalah nilai bersih barang dan jasa-jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi di suatu daerah dalam periode (Sasana, 2006). PDRB dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah mengelola sumber daya alam yang dimilikinya. Oleh karena itu besaran PDRB yang dihasilkan oleh masing-masing daerah sangat bergantung kepada potensi sumber daya alam dan faktor produksi daerah tersebut. Adanya keterbatasan dalam penyediaan faktor-faktor tersebut menyebabkan besaran PDRB bervariasi antar daerah. Sedangkan PDRB dapat dihitung dari PDRB harga konstan dibagi dengan jumlah penduduk pada suatu wilayah.

Menurut Sukirno (2014:23), PDRB adalah jumlah nilai tambah bruto (*gross value added*) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah atau propinsi. Pengertian nilai tambah bruto adalah nilai produksi (output) dikurangi dengan biaya antara (*intermediate cost*). Komponen-komponen nilai tambah bruto mencakup komponen-komponen faktor pendapatan (upah dan gaji, bunga, sewa tanah dan keuntungan), penyusutan dan pajak tidak langsung neto. Jadi dengan menghitung nilai tambah bruto dari masing-masing sektor dan kemudian menjumlahkannya akan menghasilkan produk domestik regional bruto (PDRB).

Menurut salah satu sumber di BPS (2007), PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah dalam suatu periode tertentu. Hasil perhitungan PDRB biasa dikenal sebagai PDRB menurut lapangan usaha dan PDRB menurut penggunaan. PDRB menurut lapangan usaha merupakan total nilai tambah (*value added*) dari semua kegiatan ekonomi di suatu wilayah dan pada periode waktu tertentu, sedangkan PDRB menurut penggunaan merupakan jumlah nilai barang dan jasa yang digunakan untuk konsumsi akhir.

[JAAKFE, Desember 2016]

Menurut Todaro, (2014:67), PDRB adalah nilai total atas segenap output akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian di tingkat daerah (baik itu yang dilakukan oleh penduduk daerah maupun penduduk dari daerah lain yang bermukim di daerah tersebut). Seperti telah diuraikan di atas, angka pendapatan regional dalam beberapa tahun menggambarkan kenaikan dan penurunan tingkat pendapatan masyarakat di daerah tersebut. Kenaikan/penurunan dapat dibedakan menjadi dua faktor berikut:

1. Kenaikan/penurunan riil, yaitu kenaikan/penurunan tingkat pendapatan yang tidak dipengaruhi oleh faktor perubahan harga. Apabila terjadi kenaikan riil pendapatan penduduk berarti daya beli penduduk di daerah tersebut meningkat, misalnya mampu membeli barang yang sama kualitasnya dalam jumlah yang lebih banyak.
2. Kenaikan/penurunan pendapatan yang disebabkan adanya faktor perubahan harga. Apabila terjadi kenaikan pendapatan yang hanya disebabkan inflasi (menurunnya nilai beli uang) maka walaupun pendapatan meningkat tetapi jumlah barang yang mampu dibeli belum tentu meningkat. Perlu dilihat mana yang meningkat lebih tajam, tingkat pendapatan atau tingkat harga.

Oleh karena itu, untuk mengetahui kenaikan pendapatan yang sebenarnya (*riil*), faktor inflasi harus dikeluarkan terlebih dahulu. Pendapatan regional yang di dalamnya masih ada unsur inflasinya dinamakan pendapatan regional atas dasar harga berlaku. Sedangkan pendapatan regional dengan faktor inflasi yang sudah ditiadakan merupakan pendapatan regional atas dasar harga konstan. Untuk mengetahui apakah daya beli masyarakat meningkat atau tidak, pendapatannya harus dibandingkan dalam nilai konstan. Dengan alasan inilah maka pendapatan regional perlu disajikan dalam dua bentuk, yaitu atas dasar harga yang berlaku dan atas dasar harga konstan. Harga konstan artinya harga produk didasarkan atas harga pada tahun tertentu. Tahun yang dijadikan patokan harga disebut tahun dasar untuk penentuan harga konstan.

Jadi, kenaikan pendapatan hanya disebabkan oleh meningkatnya jumlah fisik produksi, karena harga dianggap tetap (konstan). Akan tetapi, pada sektor jasa yang tidak memiliki unit produksi, nilai produksi dinyatakan dalam harga jual. Oleh karena itu, harga jual harus dideflasi dengan menggunakan indeks inflasi atau deflator lain yang dianggap lebih sesuai.

Di dalam perekonomian suatu negara, masing-masing sektor tergantung pada sektor yang lain, satu dengan yang lain saling memerlukan baik dalam tenaga, bahan

mentah maupun hasil akhirnya. Sektor industri memerlukan bahan mentah dari sektor pertanian dan pertambangan, hasil sektor industri dibutuhkan oleh sektor pertanian dan jasa-jasa. Menurut Badan Pusat Statistik (2008) angka PDRB dapat diperoleh melalui tiga pendekatan yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan dan pendekatan pengeluaran yang selanjutnya dijelaskan sebagai berikut:

1. Menurut Pendekatan Produksi

PDRB adalah jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi yang berada di suatu wilayah/provinsi dalam jangka waktu tertentu (satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajiannya dikelompokkan menjadi 9 sektor atau lapangan usaha yaitu; Pertanian, Pertambangan dan Penggalian, Industri Pengolahan, Listrik, Gas dan Air Bersih, Bangunan, Perdagangan, Hotel dan Restoran, Pengangkutan dan Komunikasi, Jasa Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan, Jasa-jasa.

2. Menurut Pendekatan Pendapatan

PDRB merupakan balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu wilayah dalam waktu tertentu. Balas jasa faktor produksi adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan; sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini PDRB mencakup juga penyusutan neto. Jumlah semua komponen pendapatan per sektor disebut sebagai nilai tambah bruto sektoral. Oleh karena itu PDRB merupakan jumlah dari nilai tambah bruto seluruh sektor.

3. Menurut Pendekatan Pengeluaran

PDRB adalah penjumlahan semua komponen permintaan akhir yaitu:

- a. Pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta yang tidak mencari untung.
- b. Konsumsi pemerintah.
- c. Pembentukan modal tetap domestik bruto.
- d. Perubahan stok.
- e. Ekspor netto.

[JAAKFE, Desember 2016]

2.2 Pengangguran

Menurut Sukirno (2012:28) pengangguran adalah jumlah tenaga kerja dalam perekonomian yang secara aktif mencari pekerjaan tetapi belum memperolehnya. Selanjutnya *International Labor Organization* (ILO) memberikan definisi pengangguran yaitu:

1. Pengangguran terbuka adalah seseorang yang termasuk kelompok penduduk usia kerja yang selama periode tertentu tidak bekerja, dan bersedia menerima pekerjaan, serta sedang mencari pekerjaan.
2. Setengah pengangguran terpaksa adalah seseorang yang bekerja sebagai buruh karyawan dan pekerja mandiri (berusaha sendiri) yang selama periode tertentu secara terpaksa bekerja kurang dari jam kerja normal, yang masih mencari pekerjaan lain atau masih bersedia mencari pekerjaan lain/tambahan (BPS, 2001:4).

Pengangguran adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari dua hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan.

Faktor-faktor yang menimbulkannya, pengangguran dibedakan kepada tiga jenis, yaitu (Simanjuntak, 2011:14):

1. Pengangguran friksional adalah pengangguran yang terjadi akibat kesenjangan waktu, informasi, maupun kondisi geografis antara pencari kerja dan lowongan kerja.
2. Pengangguran struktural adalah pengangguran yang terjadi karena pencari kerja tidak memenuhi persyaratan yang dibutuhkan untuk lowongan pekerjaan yang ada.
3. Pengangguran musiman adalah pengangguran yang terjadi karena pergantian musim. Pengangguran berkaitan dengan fluktuasi kegiatan ekonomi jangka pendek, terutama terjadi di sektor pertanian.

Masalah pengangguran tentulah tidak muncul begitu saja tanpa suatu sebab. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pengangguran dapat dibagi empat kelompok (Sukirno, 2014:44) sebagai berikut:

1. Pengangguran Normal atau Friksional

Apabila dalam suatu ekonomi terdapat pengangguran sebanyak dua atau tiga persen dari jumlah tenaga kerja maka ekonomi itu sudah dipandang sebagai mencapai kesempatan kerja penuh. Pengangguran sebanyak dua atau tiga persen tersebut

dinamakan pengangguran normal atau pengangguran friksional. Para penganggur ini tidak ada pekerjaan bukan karena tidak dapat memperoleh kerja, tetapi karena sedang mencari kerja lain yang lebih baik. Dalam perekonomian yang berkembang pesat, pengangguran adalah rendah dan pekerjaan mudah diperoleh. Sebaliknya pengusaha susah memperoleh pekerja, Akibatnya pengusaha menawarkan gaji yang lebih tinggi. Hal ini akan mendorong para pekerja untuk meninggalkan pekerjaannya yang lama dan mencari pekerjaan baru yang lebih tinggi gajinya atau lebih sesuai dengan keahliannya. Dalam proses mencari kerja baru ini untuk sementara para pekerja tersebut tergolong sebagai penganggur. Mereka inilah yang digolongkan sebagai pengangguran normal.

2. Pengangguran Siklikal

Perekonomian tidak selalu berkembang dengan teguh. Adakalanya permintaan agregat lebih tinggi, dan ini mendorong pengusaha menaikkan produksi. Lebih banyak pekerja baru digunakan dan pengangguran berkurang. Akan tetapi pada masa lainnya permintaan agregat menurun dengan banyaknya. Misalnya, di negara-negara produsen bahan mentah pertanian, penurunan ini mungkin disebabkan kemerosotan harga-harga komoditas. Kemunduran ini menimbulkan efek kepada perusahaan-perusahaan lain yang berhubungan, yang juga akan mengalami kemerosotan dalam permintaan terhadap produksinya. Kemerosotan permintaan agregat ini mengakibatkan perusahaan-perusahaan mengurangi pekerja atau menutup perusahaannya, sehingga pengangguran akan bertambah. Pengangguran dengan wujud tersebut dinamakan pengangguran siklikal.

3. Pengangguran Struktural

Tidak semua industri dan perusahaan dalam perekonomian akan terus berkembang maju, sebagiannya akan mengalami kemunduran. Kemerosotan ini ditimbulkan oleh salah satu atau beberapa faktor berikut: wujudnya barang baru yang lebih baik, kemajuan teknologi mengurangi permintaan ke atas barang tersebut, biaya pengeluaran sudah sangat tinggi dan tidak mampu bersaing, dan ekspor produksi industri itu sangat menurun oleh karena persaingan yang lebih serius dari negara-negara lain. Kemerosotan itu akan menyebabkan kegiatan produksi dalam industri tersebut menurun, dan sebagian pekerja terpaksa diberhentikan dan menjadi penganggur. Pengangguran yang wujud digolongkan sebagai pengangguran struktural. Dinamakan demikian karena disebabkan oleh perubahan struktur kegiatan ekonomi.

[JAAKFE, Desember 2016]

4. Pengangguran Teknologi

Pengangguran dapat pula ditimbulkan oleh adanya penggantian tenaga manusia oleh mesin-mesin dan bahan kimia. Racun lalang dan rumput, misalnya, telah mengurangi penggunaan tenaga kerja untuk membersihkan perkebunan, sawah dan lahan pertanian lain. Begitu juga mesin telah mengurangi kebutuhan tenaga kerja untuk membuat lubang, memotong rumput, membersihkan kawasan, dan memungut hasil. Sedangkan di pabrik-pabrik, ada kalanya robot telah menggantikan kerja-kerja manusia. Pengangguran yang ditimbulkan oleh penggunaan mesin dan kemajuan teknologi lainnya dinamakan pengangguran teknologi.

Nanga (2005:249) jam kerja, pengangguran dikelompokkan menjadi 3 macam:

- a. Pengangguran Terselubung (*Disguised Unemployment*) adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena suatu alasan tertentu.
- b. Setengah Menganggur (*Under Unemployment*) adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena tidak ada lapangan pekerjaan, biasanya tenaga kerja setengah menganggur ini merupakan tenaga kerja yang bekerja kurang dari 35 jam selama seminggu.

Pengangguran Terbuka (*Open Unemployment*) adalah tenaga kerja yang sungguh-sungguh tidak mempunyai pekerjaan. Pengangguran jenis ini cukup banyak karena memang belum mendapat pekerjaan padahal telah berusaha secara maksimal.

2.3 Hubungan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pengangguran

Salah satu indikator tingkat kesejahteraan penduduk suatu wilayah adalah PDRB. PDRB mempunyai pengaruh terhadap jumlah angkatan kerja yang bekerja dengan asumsi apabila nilai PDRB meningkat, maka jumlah nilai tambah barang dan jasa akhir dalam seluruh unit ekonomi di suatu wilayah akan meningkat. Barang dan jasa yang meningkat tersebut akan menyebabkan terjadinya peningkatan terhadap jumlah tenaga kerja yang diminta.

Secara makro, elastisitas kesempatan kerja digunakan untuk memperkirakan laju pertumbuhan produksi yang diperlukan untuk mengimbangi laju kenaikan produksi yang ada. Indikator elastisitas ini di gunakan untuk menganalisis sifat usaha padat modal dan padat karya sebagai sarana dalam penyerapan tenaga kerja.

Simanjuntak (2008) menyatakan bahwa konsep elastisitas dapat digunakan untuk memperkirakan kebutuhan tenaga untuk suatu periode tertentu, baik untuk menyusun simulasi kebijakan pembangunan untuk ketenagakerjaan yaitu dengan memilih beberapa alternatif laju pertumbuhan setiap sektor, maka dihitung kesempatan kerja yang dapat diciptakan. Kemudian dipilih kebijaksanaan pembangunan yang paling sesuai dengan kondisi pasar kerja.

2.4 Kajian Empiris

Beberapa penelitian terdahulu yang mengangkat masalah Pengaruh PDRB terhadap pengangguran yaitu sebagai berikut:

Penelitian oleh Edy, (2005) yang berjudul “Analisis Pengaruh Kesempatan Kerja, Tingkat BTP, dan Pendidikan terhadap Pengangguran di propinsi Dati I Jawa Tengah”. Penelitian dilakukan menggunakan model penghitungan Partial Adjustment Model (PMA). Penelitian ini memberikan hasil pendidikan memiliki signifikansi terhadap tingkat pengangguran baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Sementara kesempatan kerja dan BTP tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel pengangguran.

Alghofari tahun 2010, Analisis Tingkat Pengangguran di Indonesia Tahun 1980 - 2007. Variabel penelitian yang digunakan tingkat inflasi, besaran upah, pertumbuhan ekonomi dan jumlah pengangguran. Hasil penelitian ini menunjukkan Jumlah penduduk, besaran upah, dan pertumbuhan ekonomi memiliki kecenderungan hubungan positif dan kuat terhadap jumlah pengangguran.

Menurut Riska (2008) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Tingkat Pengangguran dan Faktor-faktor yang mempengaruhinya di Indonesia”. Penelitian ini menggunakan Pengangguran sebagai variabel dependen dan Upah, Beban Tanggungan Penduduk, Tingkat Inflasi, dan GDP sebagai variabel independen. Diperoleh kesimpulan variabel upah berpengaruh secara negatif dan signifikan, variabel beban tanggungan penduduk berpengaruh negatif dan signifikan, variabel inflasi berpengaruh positif dan tidak signifikan serta pertumbuhan GDP berpengaruh negative dan signifikan.

Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

[JAAKFE, Desember 2016]

H₁: PDRB Kabupaten / Kota berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran Kabupaten / Kota di Kalimantan Barat.

3. METODE PENELITIAN

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu merupakan data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi atau telah tersedia pada tempat penelitian serta sumber-sumber lain yang ada hubungannya dalam penelitian ini. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Barat dan berkenaan dengan data Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB), dan Pengangguran Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat.

Cara yang dilakukan untuk pengumpulan data didasarkan pada pencarian, pemilihan, pencatatan dan pengkategorian berdasarkan variabel dependen dan variabel independen dari dokumen statistik. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *time series* selama 5 tahun terakhir. Kemudian data tersebut akan diolah dengan komputer melalui program software economic views (*E-views6*).

4. PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Bentuk model dalam penelitian ini adalah bentuk linier sederhana. Analisis regresi dilakukan dengan metode OLS. Persamaan yang diestimasi adalah:

$$Y = \alpha_0 + \alpha_1 X_1 + \mu$$

$$\text{Pengangguran} = \alpha_0 + \alpha_1 \text{PDRB} + \mu$$

Metode ini sudah tersedia dalam perangkat lunak Eviews 6.0. Dari hasil regresi dapat diketahui:

Tabel 4.1

Hasil Regresi Dengan Pooled Least Squares (Fixed Effect Model)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	8.020562	0.653427	12.27460	0.0000
PDRB?	-1.720006	2.920007	-5.901193	0.0000
R-squared	0.708653	Mean dependent var		4.129275
Adjusted R-squared	0.632881	S.D. dependent var		2.152357

Rio

Hasil perhitungan pada koefisien regresi berganda diperoleh hasil persamaan sebagai berikut:

$$Y = 8.020562 - 1.720006 (X_1) + e$$

$$\text{Pengangguran} = 8.020562 - 1.720006 \text{ PDRB} + e$$

Dari persamaan regresi tersebut menunjukkan PDRB memiliki hubungan negatif terhadap pengangguran artinya bahwa PDRB di Kalimantan Barat memiliki hubungan yang berlawanan arah dengan pengangguran di Kalimantan Barat.

Berdasarkan persamaan regresi, konstanta (c) sebesar 8.020562 artinya tanpa adanya variabel-variabel independen, pengangguran adalah 8.020562 persen (%). Nilai koefisien X_1 (PDRB) adalah -1.720006 dengan nilai probabilitas sebesar 0,0000, sedang nilai t_{hitung} -5.901193. Hasil pengujian regresi dapat dijelaskan bahwa PDRB berpengaruh terhadap pengangguran Kabupaten / Kota Kalimantan Barat.

Tanda negatif pada koefisien menggambarkan adanya hubungan yang negatif antara PDRB terhadap pengangguran Kabupaten / Kota Kalimantan Barat. Ini berarti semakin tinggi PDRB dampaknya akan menurunkan pengangguran sebesar -5.901193 juta. Sehingga hipotesis adanya pengaruh dan signifikan variabel PDRB terhadap pengangguran di Kabupaten / Kota di Kalimantan Barat terbukti. Variabel PDRB berpengaruh secara signifikan terhadap pengangguran di Kalimantan barat, hal ini terlihat dari nilai $(0,0000) < 0,05$ dan nilai $t_{hitung} > t_{tabel} (-5.901193 > 1,999624)$.

Koefisien Determinasi (R^2) digunakan untuk melihat kuatnya hubungan variabel tersebut. Koefisien ini disebut penentu, kegunaannya adalah untuk melihat seberapa jauh kemampuan variabel bebas dalam mempengaruhi naik turunnya variabel terikat.

Dari perhitungan nilai *Adjusted R-squared*, variabel PDRB adalah 0.632881 atau 63,28% (persen) yang berarti pengaruh PDRB terhadap pengangguran di Kalimantan Barat tergolong sedang. Hal ini juga berarti kontribusi (sumbangan) yang di berikan oleh PDRB terhadap naik turunnya pengangguran di Kalimantan Barat tersebut sebesar 63,28% (persen) sedangkan sisanya 36,72% (persen) dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar variabel penelitian ini.

Dalam hal ini faktor lain yang dapat mempengaruhi pengangguran adalah angkatan kerja yang bekerja juga dapat dipengaruhi oleh tingkat realisasi investasi, inflasi daerah, maupun struktur perekonomian daerah. Secara umum di mana struktur ekonomi daerah memegang peranan cukup besar dalam mengurangi pengangguran.

[JAAKFE, Desember 2016]

Menurut Todaro (2014:77) pembangunan ekonomi mensyaratkan pendapatan nasional yang lebih tinggi dan untuk itu tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi merupakan pilihan yang harus diambil. Namun yang menjadi permasalahan bukan hanya soal bagaimana cara memacu pertumbuhan, tetapi juga siapa yang melaksanakan dan berhak menikmati hasilnya.

Secara teori setiap adanya peningkatan dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia diharapkan dapat menyerap tenaga kerja, sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah di Indonesia dapat diukur melalui peningkatan atau penurunan PDRB yang dihasilkan suatu daerah, karena indikator yang berhubungan dengan jumlah pengangguran adalah PDRB. Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang menjadi rujukan penelitian ini menunjukkan hasil yang berbeda, pengaruh PDRB dan jumlah pengangguran bersifat positif dan negatif.

Pertumbuhan ekonomi melalui PDRB yang bersifat positif dikarenakan pertumbuhan ekonomi tidak dibarengi oleh peningkatan kapasitas produksi, sehingga pengangguran tetap meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat ini berorientasi pada padat modal, di mana kegiatan produksi untuk memacu output dan menghasilkan pendapatan yang meningkat lebih diutamakan ketimbang pertumbuhan ekonomi yang berorientasi pada padat karya.

Tingkat pengangguran yang tinggi dapat membawa berbagai dampak pada proses pembangunan ekonomi. Agar tidak terus berlanjut, pemerintah harus mengatasi masalah pengangguran, karena masalah pengangguran adalah masalah yang sangat vital dan sensitif bagi kestabilan ekonomi dan keamanan suatu negara. Pengangguran dapat membawa dampak yang sangat berbahaya jika tidak segera diatasi. Pengangguran berdampak dalam bidang ekonomi, sosial, maupun secara individual pada pelaku pengangguran itu sendiri. Diantara dampak pengangguran tersebut antara lain:

1. Penurunan permintaan agregat.
2. Penurunan penawaran agregat.
3. Penurunan tingkat upah.
4. Penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat.
5. Penurunan tingkat investasi.
6. Penurunan penerimaan pajak.
7. Munculnya sektor informal.

Rio

8. Menimbulkan masalah sosial.
9. Penurunan potensi dan produktivitas individu.

Penelitian lain yang menyatakan pengaruh negatif antara PDRB terhadap jumlah pengangguran berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi yang meningkat di Kalimantan Barat memberikan peluang kerja baru ataupun memberikan kesempatan kerja dan berorientasi pada padat karya, sehingga pertumbuhan ekonomi mengurangi jumlah pengangguran.

Sebagai solusi pengangguran berbagai strategi dan kebijakan dapat ditempuh, yaitu: Pemerintah memberikan bantuan wawasan, pengetahuan dan kemampuan jiwa kewirausahaan kepada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) berupa bimbingan teknis dan manajemen memberikan bantuan modal lunak jangka panjang, perluasan pasar. Serta pemberian fasilitas khusus agar dapat tumbuh secara mandiri dan andal bersaing di bidangnya. Mendorong terbentuknya kelompok usaha bersama dan lingkungan usaha yang menunjang dan mendorong terwujudnya pengusaha kecil dan menengah yang mampu mengembangkan usaha, menguasai teknologi dan informasi pasar dan peningkatan pola kemitraan UKM dengan BUMN, BUMD, BUMS dan pihak lainnya.

Melakukan pembenahan, pembangunan dan pengembangan kawasan-kawasan, khususnya daerah yang tertinggal dan terpencil sebagai prioritas dengan membangun fasilitas transportasi dan komunikasi. Ini akan membuka lapangan kerja bagi para penganggur di berbagai jenis maupun tingkatan. Harapan akan berkembangnya potensi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) baik potensi sumber daya alam, sumber daya manusia.

Membangun lembaga sosial yang dapat menjamin kehidupan penganggur. Seperti PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PT Jamsostek) Dengan membangun lembaga itu, setiap penganggur di Indonesia akan terdata dengan baik dan mendapat perhatian khusus. Secara teknis dan rinci.

Menyederhanakan perizinan dan peningkatan keamanan karena terlalu banyak jenis perizinan yang menghambat investasi baik Penanaman Modal Asing maupun Penanaman Modal Dalam Negeri. Hal itu perlu segera dibahas dan disederhanakan sehingga merangsang pertumbuhan iklim investasi yang kondusif untuk menciptakan lapangan kerja.

[JAAKFE, Desember 2016]

Mengembangkan sektor pariwisata dan kebudayaan Indonesia (khususnya daerah-daerah yang belum tergali potensinya) dengan melakukan promosi-promosi keberbagai negara untuk menarik para wisatawan asing, mengundang para investor untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan dan pengembangan kepariwisataan dan kebudayaan yang nantinya akan banyak menyerap tenaga kerja daerah setempat.

Hasil penelitian yang diperoleh, variabel PDRB (X_1) dengan variabel Pengangguran (Y), terdapat pengaruh yang signifikan karena $p_value < \alpha$; $0,0000 < 0,05$, menentukan taraf nyata (α) 5% dengan $df = (n-k)$ untuk menentukan nilai t_{tabel} . Nilai t_{tabel} pada (α) 5% dengan $df = (14-2) = 12$ adalah sebesar 1.943 Nilai t_{hitung} yang diperoleh dari hasil regresi dengan bantuan eviews 6 adalah sebesar -5.901193, jadi $t_{hitung} > t_{tabel}$ sehingga keputusan yang diambil adalah menolak H_0 . Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh PDRB mempunyai nilai negatif terhadap pengangguran.

Hasil penelitian di atas sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan (2012) dimana hasilnya yang menyebutkan bahwa PDRB memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengangguran terbuka. Hasil penelitian serupa yang dilakukan RB (2014) menyebutkan bahwa PDRB berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di kabupaten/kota provinsi Jawa Timur tahun 2007-2011. Berbeda dengan hasil penelitian Muhammad Umair (2013) menyebutkan "*The correlation between GDP and unemployment rate has also been found insignificant with a value of 0.196*". Artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara GDP dengan pengangguran karena nilai p_value 0,196.

Penelitian lain yang menyatakan pengaruh antara PDRB terhadap jumlah pengangguran berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi yang meningkat di Kalimantan Barat memberikan peluang kerja baru ataupun memberikan kesempatan kerja dan berorientasi pada padat karya, sehingga pertumbuhan ekonomi mengurangi jumlah pengangguran.

Signifikansi pengaruh PDRB terhadap pengangguran di kabupaten/kota provinsi Kalimantan Barat tahun 2009-2013 disebabkan oleh peningkatan PDRB pada masing-masing kabupaten/kota di provinsi Kalimantan Barat yang dialokasikan untuk berbagai kegiatan ekonomi yang berorientasi pada sektor riil sehingga berkontribusi terhadap peningkatan penyerapan tenaga kerja dan menurunkan jumlah pengangguran, mulai dari sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri pengolahan,

sektor listrik, gas dan air bersih, sektor konstruksi, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, hingga sektor jasa-jasa.

Diantara sektor tersebut, terdapat tiga sektor unggulan yang berkontribusi paling dominan dalam pembentukan PDRB dan menyerap tenaga kerja, yaitu; sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor industri pengolahan, dan sektor pertanian. Hal ini menunjukkan jika nilai PDRB mempunyai peran sangat penting dalam pengangguran. PDRB (X_1) memiliki pengaruh yang kuat terhadap Pengangguran (Y) berarti bila nilai PDRB mengalami penurunan setiap tahun, maka Pengangguran akan menurun, begitu juga sebaliknya, bila nilai PDRB mengalami penurunan, maka pengangguran akan meningkat. Karena adanya peningkatan dalam pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat menyerap tenaga kerja, sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator kinerja yang menggambarkan hasil dari pembangunan yang telah dicapai. Indikator ini penting bagi daerah karena dapat digunakan sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah daerah atas keberhasilan pembangunan yang telah dicapai sekaligus sebagai dasar perencanaan dan pengambilan kebijakan di masa yang akan datang. Penelitian yang dilakukan Dharmayanti (2011) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah diartikan sebagai kenaikan PDRB tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak. Hal ini berarti bahwa pertumbuhan ekonomi daerah secara langsung ataupun tidak langsung akan menciptakan lapangan pekerjaan.

Penelitian yang dilakukan Nainggolan (2009) menunjukkan bahwa pengaruh PDRB dan jumlah pengangguran yang bersifat positif dalam teori pertumbuhan ekonomi. Dikatakan berpengaruh positif sebab pertumbuhan ekonomi tidak dibarengi oleh peningkatan kapasitas produksi, sehingga jumlah pengangguran tetap meningkat seiring pertumbuhan ekonomi yang berlangsung. Hal ini disebabkan pertumbuhan ekonomi meningkat berorientasi pada padat modal, di mana kegiatan produksi untuk memacu output dan menghasilkan pendapatan yang meningkat lebih diutamakan ketimbang pertumbuhan ekonomi berorientasi pada padat karya.

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat tahun 2014 tumbuh positif, namun hampir seluruh Kabupaten/Kota pertumbuhannya sedikit lebih

[JAAKFE, Desember 2016]

kecil dibandingkan tahun 2012. Dengan kata lain terjadi perlambatan pertumbuhan. Perlambatan pertumbuhan terjadi di 12 Kabupaten/Kota, sedangkan 2 kabupaten mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya yaitu Kabupaten Pontianak dan Kabupaten Kayong Utara.

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota tertinggi tahun 2013 dicapai oleh Kota Singkawang 6,34 persen, diikuti Kabupaten Sekadau 6,11 persen dan Kabupaten Pontianak 6,00 persen. Ketiga Kabupaten/Kota tersebut melampaui laju pertumbuhan Kalimantan Barat yang hanya mencapai 5,02 persen. Ini berarti pertumbuhan ketiga Kabupaten/Kota tersebut kota relatif lebih cepat dibandingkan pertumbuhan total Kalimantan Barat. Selain ketiga Kabupaten/Kota tersebut Kota Pontianak, Kabupaten Kayong Utara, Kabupaten Sambas, dan Kabupaten Sintang termasuk daerah yang tingkat pertumbuhan ekonominya di atas pertumbuhan ekonomi total Kalimantan Barat.

Secara teori setiap adanya peningkatan dalam pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat diharapkan dapat menyerap tenaga kerja, sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah di Kalimantan Barat dapat diukur melalui peningkatan atau penurunan PDRB yang dihasilkan suatu daerah, karena indikator yang berhubungan dengan jumlah pengangguran adalah PDRB. Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang menjadi rujukan penelitian ini menunjukkan hasil yang berbeda, pengaruh PDRB dan jumlah pengangguran bersifat positif dan negatif. Pertumbuhan ekonomi melalui PDRB yang bersifat positif dikarenakan pertumbuhan ekonomi tidak dibarengi oleh peningkatan kapasitas produksi, sehingga pengangguran tetap meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat ini berorientasi pada padat modal, di mana kegiatan produksi untuk memacu output dan menghasilkan pendapatan yang meningkat lebih diutamakan ketimbang pertumbuhan ekonomi yang berorientasi pada padat karya.

5. PENUTUP

Temuan dari penelitian ini adalah PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran Kabupaten/Kota di Kalimantan barat, artinya semakin bertambah PDRB, maka pengangguran semakin menurun, hal ini disebabkan karena sumbangan PDRB tertinggi pada aspek pertanian, aspek pertanian tidak dapat menyerap

Rio

banyak tenaga kerja sehingga walaupun PDRB naik, tidak diikuti oleh penurunan pengangguran.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus diimbangi dengan kesejahteraan masyarakat yang merata. Untuk itu pemerintah diharapkan dapat lebih mengoptimalkan sektor-sektor dalam PDRB agar sektor-sektor tersebut mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan mengurangi pengangguran di Provinsi Kalimantan Barat seperti pelatihan untuk menjadi wirausaha mandiri dan kreatif.

Untuk mengurangi tingkat pengangguran di Kalimantan Barat maka mobilitas atau pembangunan ekonomi seharusnya diarahkan menuju daerah yang mempunyai pengangguran yang rendah, atau daerah dengan perekonomian yang rendah. Dalam hal ini, pemerintah selayaknya untuk berinvestasi di daerah dengan perekonomian yang rendah yang berorientasi pada padat karya. Sektor sekunder dan tersier harus lebih dipacu produktivitasnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alghofari, Farid. 2010. Analisis Tingkat Pengangguran di Indonesia Tahun 1980 – 2007. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.
- Alim, Moch. Rum. 2007. Analisis Faktor Penentu Pengangguran Terbuka di Indonesia Periode 1980-2007. Skripsi.
- Badan Pusat Statistik. (2014). Kalimantan Barat dalam Angka. Pontianak: BPS Provinsi Kalimantan Barat
- , 2013. Kalimantan Barat dalam Angka. Pontianak: BPS Provinsi Kalimantan Barat
- , 2012. Kalimantan Barat dalam Angka. Pontianak: BPS Provinsi Kalimantan Barat
- , 2011. Kalimantan Barat dalam Angka. Pontianak: BPS Provinsi Kalimantan Barat
- , 2010. Kalimantan Barat dalam Angka. Pontianak: BPS Provinsi Kalimantan Barat
- , 2009. Kalimantan Barat dalam Angka. Pontianak: BPS Provinsi Kalimantan Barat
- Djojohadikusumo, Sumitro. 2014. Perkembangan Pemikiran Ekonomi Dasar Teori Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan. LP3ES, Jakarta.
- Dumairy. 2002. Perekonomian Indonesia. Jakarta: Erlangga.

Rio

Edy, Irwan Christanto. 2005. Analisis Pengaruh Kesempatan Kerja, Tingkat BTP, dan Pendidikan terhadap Pengangguran di propinsi Dati I Jawa Tengah. Skripsi.

Gujarati, 2005. Ekonometri Dasar. Terjemahan: Sumarno Zain. Jakarta: Erlangga.

Hanum, Wirda. 2008. Analisis Pengaruh Perkembangan Industri UKM Terhadap Pertumbuhan Sektor Industri Sumatera Utara. Fakultas Ekonomi Medan.

Hastuti, Wulan. 2013. Analisis Tingkat Kemiskinan, Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Skripsi. Perpustakaan.uns.ac.id.

Kuncoro, Mudrajad. 2009. Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi. Jakarta: Erlangga.

Kurniawan, Roby Cahyadi. 2012. Analisis Pengaruh PDRB, UMK, dan Inflasi Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Malang Tahun 1980-2001. Jurnal ilmiah (online), (<http://jimfeb.ub.ac.id>, diakses 3 Juni 2016).

Mangkoesebroto, Guritno. 2008, Ekonomi Publik. BPFE UGM Yogyakarta.

Muhammad Umair, 2013. Impact of GDP and Inflation on Unemployment Rate: A Study of Pakistan Economy in 2000-2010. Jurnal: Vol. 2 Issue.2 International Review of Management and Business Research

Nachrowi, D Nachrowi. 2006, Ekonometrika, untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan. Cetakan Pertama. Jakarta: Lembaga Penerbit FE UI.

Nainggolan, Indra Oloan. 2009. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesempatan Kerja Pada Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Utara. Tesis Ketenagakerjaan, <http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/7180>. Diakses pada 1 Maret 2016. Medan.

[JAAKFE, Desember 2016]

Nanga, Muana. 2005. Makroekonomi: Teori, Masalah dan Kebijakan. Edisi Kedua. Jakarta: PT. Raja Grafiika Persada.

Ps, Djarwanto. 2011. Statistik Nonparametrik. Surakarta. BPFE Yogyakarta.

Rachim, Rizka Juita. 2013. Analisis Pengaruh Upah Minimum Provinsi, Pengeluaran Pemerintah, Investasi Swasta dan Jumlah Penduduk terhadap Pengangguran Terbuka di Provinsi Sulawesi Selatan Periode Tahun 1996-2010. Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Hasanuddin Makassar.

Rahardja dan Manurung, 2008. Teori Ekonomi Makro: Suatu Pengantar. Lembaga Penerbit FE UI. Jakarta.

Rahayu, Sri Endang. 2011. Analisis Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Utara. Jurnal Ilmiah Manajemen & Bisnis Vol 11, No 2 (2011): Manajemen Bisnis.

RB, Tengko Sarimuda. 2014. Pengaruh PDRB, UMK, Inflasi, Dan Investasi Terhadap Pengangguran Terbuka Di Kab/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2007 – 2011. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Tahun XXIV, No. 2 Agustus 2014.

Riska, Fitra Kincaka. 2008. Analisis Tingkat Pengangguran dan Faktor-faktor yang mempengaruhinya di Indonesia. Skripsi. Semarang. Fakultas Ekonomi UNDIP.

Rustiono, Deddy. 2008. Analisis pengaruh investasi, tenaga kerja, dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah. *Tesis*. Megister Ilmu Ekonomi & Studi Pembangunan. Program Studi MIESP UNDIP Semarang.

Sasana, Hadi, 2006. Analisis Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah.

[http://eprints.undip.ac.id/16947/1/Analisis_Dampak_Desentralisasi_Fiskal_Terhadap...by_Hadi_Sasana_\(OK\).pdf/](http://eprints.undip.ac.id/16947/1/Analisis_Dampak_Desentralisasi_Fiskal_Terhadap...by_Hadi_Sasana_(OK).pdf/) (29 Mei 2016).

Simanjuntak, 2011. Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Sugiyono, 2009. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Seri 21. Bandung: CV. Alfabet.

Sukirno, Sadono. 2014. Makroekonomi Teori Pengantar. Edisi ke-3 (Terjemahan Bahasa Indonesia). Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Suryana, 2010. Ekonomi Pembangunan. Jakarta: Selemba Empat.

Todaro, Michael P., dan Smith, Stephen C. 2014. Pembangunan Ekonomi/ Edisi Kesembilan, Jilid 1 (Alih Bahasa: Haris Munandar dan Puji A.L.). Jakarta: Penerbit Erlangga.

Ufirah Isbah, 2012. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Di Indonesia Tahun 1995-2012. S2 Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan UGM.

Winarno. 2011. Pengantar Penelitian Ilmiah. Jakarta: Rineka Cipta.